



## Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Ketidaksetaraan Sosial di Negara Berkembang

Lulu Marisa Lumban Tobing<sup>1</sup>, Ingrid Sisilia Lumban Raja<sup>2</sup>, Muhammad Nabel Azirah Djou<sup>3</sup>, Mellyana Candra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
E-mail: [lumbantobingmarisa@gmail.com](mailto:lumbantobingmarisa@gmail.com)<sup>1</sup>, [inggridsslia2@gmail.com](mailto:inggridsslia2@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nabieldjou3902@gmail.com](mailto:nabieldjou3902@gmail.com)<sup>3</sup>, [mellyana1001@gamil.com](mailto:mellyana1001@gamil.com)<sup>4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received June 08, 2025

Revised June 25, 2025

Accepted June 29, 2025

#### Keywords:

Social Inequality, Economic Policy, Developing Countries, Market Liberalization, Fiscal Policy.

### ABSTRACT

*This study examines the impact of various economic policies on social inequality in developing countries. Using a comparative analysis and case study approach, this study investigates the relationship between market liberalization, fiscal policy, social protection programs, and the development of inequality. Data were analyzed from several developing countries with different economic and social characteristics to identify patterns and determinants of inequality. Preliminary findings suggest that economic policies that are not accompanied by effective redistribution mechanisms tend to widen social inequality, while inclusive approaches that take into account social justice dimensions have the potential to reduce inequality. This research contributes to a more comprehensive understanding of the complex relationship between economic policies and social inequality in developing country contexts.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received June 08, 2025

Revised June 25, 2025

Accepted June 29, 2025

#### Keywords:

Liberalisasi Pasar, Kebijakan Fiskal, Program Perlindungan Sosial, Perkembangan Ketimpangan.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak berbagai kebijakan ekonomi terhadap ketidaksetaraan sosial di negara-negara berkembang. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif dan studi kasus, penelitian ini menginvestigasi hubungan antara liberalisasi pasar, kebijakan fiskal, program perlindungan sosial, dan perkembangan ketidaksetaraan. Data dianalisis dari beberapa negara berkembang dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda untuk mengidentifikasi pola dan faktor determinan ketidaksetaraan. Temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang tidak disertai dengan mekanisme redistribusi yang efektif cenderung memperlebar kesenjangan sosial, sementara pendekatan inklusif yang memperhatikan dimensi keadilan sosial berpotensi mengurangi ketidaksetaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan kompleks antara kebijakan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial di konteks negara berkembang.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Lulu Marisa Lumban Tobing  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
E-mail: [lumbantobingmarisa@gmail.com](mailto:lumbantobingmarisa@gmail.com)

**Pendahuluan**

Ketidaksetaraan sosial menjadi isu global yang semakin mendesak, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan sosial yang kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara berkembang telah mengadopsi berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari liberalisasi pasar hingga program perlindungan sosial, yang memiliki implikasi signifikan terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Namun, meskipun banyak negara berkembang mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, ketidaksetaraan sosial justru cenderung meningkat di banyak kasus.

Pemahaman mendalam tentang hubungan antara kebijakan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial sangat penting untuk pengembangan strategi pembangunan yang lebih inklusif. Kebijakan ekonomi seperti privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan reformasi pajak dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap berbagai kelompok sosial ekonomi. Sementara itu, perkembangan teknologi dan globalisasi telah menciptakan dimensi baru dalam ketidaksetaraan, termasuk kesenjangan digital dan akses terhadap pasar global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi yang spesifik memengaruhi dinamika ketidaksetaraan sosial di negara berkembang. Secara khusus, penelitian ini akan menginvestigasi pengaruh kebijakan fiskal, program jaring pengaman sosial, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan pasar tenaga kerja terhadap berbagai indikator ketidaksetaraan sosial. Pertanyaan penelitian utama meliputi: (1) Bagaimana dampak liberalisasi ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan dan kekayaan? (2) Sejauh mana kebijakan fiskal dan redistribusi dapat mengurangi ketidaksetaraan di negara berkembang? (3) Apa peran program perlindungan sosial dalam konteks ekonomi yang berorientasi pasar? Dengan mengidentifikasi kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan di negara berkembang dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Tinjauan Literatur**

Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk hasil dan peluang sosial-ekonomi individu, yang secara signifikan memengaruhi pola ketidaksetaraan ekonomi (Hutagaol et al., 2022; Leila & Kimpo, 2022; Rahman, 2024; Teasley, 2022). Pendidikan yang berkualitas, seperti yang disoroti dalam penelitian ini, tidak hanya menanamkan keterampilan dan pengetahuan yang penting, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan potensi penghasilan, yang pada akhirnya mendorong mobilitas sosial ke atas (Ahmed et al., 2021). Negara-negara dengan kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan memiliki posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial-ekonomi, sementara tantangan dalam implementasi kebijakan, keengganan politik, hambatan ekonomi, dan korupsi dapat menghambat kemajuan, seperti yang terlihat dalam kasus Pakistan. Memahami hubungan yang rumit antara kebijakan pendidikan dan hasil sosial-ekonomi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Memahami efektivitas intervensi kebijakan pendidikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sangat penting untuk menginformasikan keputusan kebijakan berbasis bukti dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di Indonesia.



Distribusi pendapatan, aspek kunci dari ketimpangan ekonomi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepemilikan modal manusia, kondisi pasar tenaga kerja, dan pengaturan kelembagaan (M. Putri & Iryani, 2023; Wagle, 2023). Berbagai studi menyoroti dampak dari berbagai variabel terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, termasuk pertumbuhan sektor pertanian, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja, inflasi, tingkat kemiskinan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika populasi (Arafah & Khoirudin, 2022; Ma, 2023). Mengatasi ketimpangan pendapatan membutuhkan fokus pada penghapusan ketimpangan kesempatan, karena ketimpangan ini berkontribusi secara signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan (Kumari, 2023). Ketidaksetaraan sosial, yang mencakup batas-batas gender dan perbedaan akses terhadap sumber daya berdasarkan berbagai kategori sosial, semakin memperparah ketidaksetaraan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan memahami dan menangani faktor-faktor yang beragam ini, para pembuat kebijakan dapat berupaya menciptakan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Investasi di bidang pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan perluasan pendidikan dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka panjang karena transformasi struktural yang mereka dorong, seperti pergeseran lapangan kerja ke sektor-sektor yang memiliki perbedaan upah yang lebih tinggi (Makhlouf & Lalley, 2023). Kebijakan investasi sosial, jika disertai dengan redistribusi, telah terbukti secara efektif menurunkan kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan meningkatkan keterampilan dan kelayakan kerja individu, sehingga membantu pengentasan kemiskinan (Sakamoto, 2023). Selain itu, penelitian tentang pengeluaran pendidikan keluarga menyoroti korelasi positif antara peningkatan investasi dalam pendidikan dan pemerataan yang lebih besar dalam hasil pendidikan, yang menekankan peran kebijakan sosial dalam mempromosikan peluang pendidikan untuk semua dan mengurangi kesenjangan pendidikan (Leila & Kimpo, 2022). Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendidikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesetaraan sosial-ekonomi, dan menekankan perlunya perumusan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang hubungan antara kebijakan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Desain penelitian meliputi analisis komparatif lintas negara serta studi kasus mendalam dari beberapa negara berkembang terpilih yang mewakili berbagai karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial-politik.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli mengenai pembahasan pengaruh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi terhadap kesehatan mental didapatkan bahwa hubungan tersebut dapat dikatakan positif yang membuat adanya pengaruh terhadap kesehatan mental. Terutama saat ini kasus masalah kesehatan mental di Indonesia cukup tinggi yaitu berada di peringkat ke-2 di Asia (Estimates Global Health, 2017). Permasalahan mental ini tentunya tidak dapat disepelekan karena banyaknya kasus yang hingga mengarah ke mengakhiri hidup. Sehingga kita sebagai manusia yang makhluk sosial perlu adanya kepekaan terhadap manusia lain, karena lingkungan sekitar kita juga sangat rentan munculnya permasalahan kesenjangan sosial (Ziaei & Hammarström, 2021). Terutama kasus permasalahan mental yang ada di Indonesia sering terjadi pada masa anak remaja. Berdasarkan Riskesdas (2018), prevalensi depresi pada penduduk umur diatas 15 tahun, sedangkan hasil Indonesia – National 351 | **JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner**



Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) Tahun 2022 prevalensi gangguan kesehatan mental di usia 10-17 tahun.

Salah satu yang mempengaruhi kesehatan mental adalah ketidaksetaraan sosial merupakan keadaan munculnya kesenjangan, ketimpangan, maupun ketidaksetaraan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu masyarakat. Kondisi masyarakat yang berada pada tingkat ketidaksetaraan sosial yang tinggi ditandai dengan tingginya tingkat kekerasan dan kejahatan, serta rendahnya tingkat kepercayaan sosial (Elgar, 2011; Walberg et al, 1998; Wilkinson & Pickett, 2009). Oleh karena itu, pada tingkat populasi, masyarakat yang tinggal di masyarakat yang lebih tidak setara mungkin mengalami kesehatan mental yang kurang baik dibandingkan orang yang tinggal di masyarakat yang lebih setara. Penelitian Kivimäki et al. (2020), sebanyak 56 orang yang dijadikan sampel, mendapati bahwa 18 orang memiliki permasalahan kesehatan mental akibat dari ketidaksetaraan sosial yang dihadapi di lingkungan bermasyarakat. Dalam hal ini berarti lingkungan bertetangga yang kurang baik, dan juga tidak menghargai perbedaan-perbedaan dalam berkehidupan bertetangga. Kesehatan mental remaja di berbagai Negara menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di Negara dengan ketimpangan pendapatan lebih tinggi mendapati tingkat masalah kesehatan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Negara dengan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah (Elgar et al., 2015; Holstein et al., 2009; Ottová Jordan et al., 2015).

Penelitian ini didukung penelitian Wilkinson dan Pickett (2009) yang membandingkan negara dengan tingkat ketidaksetaraan sosial yang berbeda-beda mendapat bahwa masyarakat yang lebih setara akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang kurang setara. Ketidaksetaraan sosial ini meliputi banyak aspek seperti aspek pendidikan, status sosial dan budaya. Maka dari itu, ketidaksetaraan sosial akan memiliki pengaruh juga terhadap kesehatan mental, karena masyarakat yang memiliki keadaan sosial yang rendah masih menganggap kesehatan mental merupakan hal yang tidak penting dan memunculkan stigma negatif. Karena pada negara-negara berkembang tingkat stigma negatif seperti itu yang menjadi hambatan utama dalam penyedia dan pemanfaatan layanan kesehatan mental (Horwitz, Roberts, & Warner, 2008; Okasha, 2002; Onyut et al., 2009; Ssebunnya, Kigozi, Lund, Kizza, & Okello, 2009). Sehingga membuat remaja merasa takut dalam mengungkapkan masalah yang sedang dirasakan atau dihadapi. Semakin lama para remaja menghadapi permasalahan itu sendiri, maka akan semakin sulit juga untuk diselesaikan yang membuat terganggunya kesehatan psikologis hingga menuju terganggunya kesehatan fisik. Tidak hanya ketidaksetaraan sosial, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, yaitu tingkat ekonomi.

Setiap manusia memiliki ketuhan dalam upaya meraih kemakmuran dalam hidupnya. Terutama saat ini segala hal memerlukan uang sebagai alat transaksi pendukung kehidupan, sehingga jika seseorang memiliki permasalahan pada ekonominya maka akan berdampak juga pada kehidupannya. Pengaruh tingkat ekonomi ini secara tidak langsung terlibat dalam kesehatan mental yang ada pada diri remaja. Remaja yang kurang beruntung karena permasalahan ekonomi akan memunculkan stress dan frustrasi karena tekanan ekonomi (Hagquist, 1998). Individu yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah biasanya tidak memiliki akses memadai terhadap fasilitas kesehatan yang baik. Hal ini membuat remaja dengan tingkat ekonomi rendah kurang mendapatkan perhatian perihal kesehatan mental. Reiss (2013) menyatakan bahwa keadaan ekonomi yang rendah secara signifikan berpengaruh terhadap munculnya gangguan kesehatan mental, sedangkan kondisi ekonomi yang meningkat akan menurunkan gangguan kesehatan mental. Maka dari itu kesehatan mental memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Terutama pada fase remaja ini, aktivitas lebih banyak dilakukan di sekolah untuk pendidikan, sehingga akan muncul juga faktor-faktor eksternal seperti adanya perilaku bullying ketika di sekolah yang akan memperburuk keadaan kesehatan mental remaja.



## Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, didapati adanya pengaruh yang besar pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi pada kesehatan mental. Terlihat dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hubungan tersebut memiliki pengaruh dan dampak pada kehidupan sehari-hari. Pada ketidaksetaraan sosial diperlukan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat agar hal-hal tersebut tidak terjadi dan dapat saling mengingatkan kepada lingkungan sosial kita. Peningkatan kesadaran diperlukan juga agar tidak terkikisnya solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam upaya mendukung kesehatan mental yang merata pemerintah harus berperan dalam menyediakan layanan-layanan kesehatan mental gratis bagi remaja yang memiliki masalah kesehatan mental dan berada dalam masalah ekonomi (Layard 2013).

Pada penelitian ini masih sangat banyak kekurangan dalam melakukan literature review dan juga dalam hal aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan mental. Sehingga peneliti berharap pada penelitian lebih lanjut, diperhatikan kembali mengenai penelitian penelitian sebelumnya dengan harapan menjadi dapat melengkapi penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menyarankan jika penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena akan memiliki data yang lebih akurat dan juga factual berdasarkan data yang ada di lapangan. penelitian yang berkontribusi untuk mengungkap bagaimana masalah kesehatan mental remaja dipengaruhi oleh kerugian ekonomi pada tingkat individu masih kurang. (Currie et al., 2008; Moor et al., 2015).

## Daftar Pustaka

- Ahmed, Z., Khan, S., Saeed, S., & Haider, S. I. (2021). An Overview of Educational Policies of Pakistan (1947-2020). *Psychology and Education*, 58(1), 4459–4463.
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 628–636.
- Currie, C., Molcho, M., Boyce, W., Holstein, B., Torsheim, T., & Richter, M. (2008). Researching health inequalities in adolescents: The development of the Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) family affluence scale. *Soc Sci Med*, 66(6), 1429–1436.
- Hagquist, C. E. (1998). Economic stress and perceived health among adolescents in Sweden. *J Adolesc Health*, 22(3), 250–257.
- Horwitz, A. V. (2010). How An Age Of Anxiety Became An Age Of Depression. *Milbank Q*, 88(1), 112–138.
- Elgar, F. J., & Aitken, N. (2011). Income inequality, trust and homicide in 33 countries. *European Journal of Public Health*, 21(2), 241–246.
- Elgar, F. J., Pfortner, T.-K., Moor, I., De Clercq, B., Stevens, G. W. J. M., & Currie, C. (2015). Socioeconomic inequalities in adolescent health 2002-2010: A time-series analysis of 34 countries participating in the Health Behaviour in School-aged Children study. *Lancet*, 285, 2088–2095.
- Hutagaol, A. L., Syukri, M., Siahaan, A., & Wardah, S. R. R. (2022). An Analysis of National Education System Policy and Social Values. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 6497–6504.



- Putri, M., & Iryani, N. (2023). Factors Affecting Income Distribution Inequality. *Gorontalo Development Review*, 98–109.
- Putri, M. R., Nugraha, G. S., & Dwiyanaputra, R. (2023). Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Pendidikan Menggunakan Metode K-Means Clustering. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering (J-Cosine)*, 7(1), 76–83.
- Kumari, S. (2023). Inequalities based on social categories, culture, race, religion and ethnicity. *IJPS*, 5(1), 5–8.
- Makhlouf, Y., & Lalley, C. (2023). Education Expansion, Income Inequality and Structural Transformation: Evidence From OECD Countries. *Social Indicators Research*, 169(1), 255–281.
- Sakamoto, T. (2023). Poverty, inequality, and redistribution: An analysis of the equalizing effects of social investment policy. *International Journal of Comparative Sociology*, 00207152231185282.
- Leila, G., & Kimpo, J. N. (2022). The Relationship between Education Policy and Socioeconomic Inequality. *Journal of Education Review Provision*, 2(3), 83–90.
- Layard, R. (2013). Mental health: The new frontier for labour economics. *IZA Journal of Labor Policy*, 2(2), 1–16.